

PENGARUH PERKEMBANGAN DEMOKRASI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Ferdy Senja Putra Novanto

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: ferdy.19029@mhs.unesa.ac.id

Prayudi Setiawan Prabowo

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: prayudiprabowo@unesa.ac.id

Abstrak

Ekonomi kelembagaan menjelaskan bahwa ekonomi bekerja dipengaruhi oleh aturan/norma. Studi ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh perkembangan demokrasi dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Studi ini menjadikan 34 provinsi yang ada di Indonesia pada periode 2015-2020 sebagai sampel. Variabel independen meliputi kebebasan sipil, hak-hak politik, lembaga-lembaga demokrasi, dan indeks pembangunan manusia. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen. Analisis regresi data panel dengan menerapkan Eviews adalah teknik analisis yang diterapkan dalam kajian ini. Penggunaan Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan temuan penelitian bahwa, 1) secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap dependen. 2) Secara parsial variabel kebebasan sipil berhubungan negatif signifikan, 3) variabel hak hak politik tidak berpengaruh, 4) variabel lembaga demokrasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan 5) dan indeks Pembangunan manusia secara negatif dan signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci : demokrasi, pertumbuhan ekonomi, ipm, ekonomi kelembagaan.

Abstract

Institutional economics explains that the economy works influenced by rules/norms. This study aims to determine the effect of democratic development and human development index on economic growth in Indonesia. This study takes 34 provinces in Indonesia in the 2015-2020 period as a sample. Independent variables include civil liberties, political rights, democratic institutions, and human development index. Meanwhile, economic growth is the dependent variable. Panel data regression analysis using Eviews is the analytical technique applied in this study. The use of the Fixed Effect Model (FEM) shows the research findings that, 1) simultaneously the independent variables have a significant effect on the dependent. 2) Partially, the civil liberties variable is negatively and significantly related, 3) the political rights variable has no effect, 4) the democratic institutions variable has a positive and significant effect 5) and the human development index negatively and significantly affects economic growth.

How to cite: Novanto, F. S. P., & Prabowo, P. S. (2024). Pengaruh Perkembangan Demokrasi dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *INDEPENDENT : Journal Of Economics*, 4(1), 41-53.

Keywords: *democracy, economic growth, hdi, institutional economic.*

PENDAHULUAN

Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah indikator utama untuk mengetahui kesehatan ekonomi negara tersebut. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) (2023), pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan naik/turun nya nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dengan mengesampingkan perubahan yang terjadi pada struktur ekonominya. PDB merepresentasikan nilai total produk dan jasa yang merupakan hasil dari semua sektor ekonomi. Atas Dasar Harga Berlaku (PDB ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (PDB ADHK) adalah dua jenis PDB yang tertera dalam BPS. Dalam melihat pergeseran sektor ekonomi atau struktur ekonomi maka, digunakanlah PDB ADHB sedangkan, untuk melihat pertumbuhan ekonomi digunakanlah PDB ADHK (Badan Pusat Statistik, 2023). Berdasarkan data yang terdapat pada *World Bank* atau Bank Dunia, nilai PDB Indonesia pada tahun 2021 mencapai US\$1,19 triliun atau setara dengan Rp 16,97 kuadriliun. Sedangkan, pada tahun 2020 PDB Indonesia sebesar Rp 15,4 kuadriliun, yang artinya terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69%.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2013-2021

Kondisi pertumbuhan ekonomi menurun pada tahun 2014, 2015, dan 2019. Pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan dari 5,56% di tahun 2013 menjadi 4,88% pada tahun 2015. Bank Indonesia (2021) menyatakan, hal ini terjadi salah satu akibat dari melemahnya pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang disebabkan oleh menurunnya permintaan global dan pengurangan laju pertumbuhan kredit yang terlalu tinggi. Pada tahun 2015 hingga 2018 perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang stabil, sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 0,15% yang disebabkan oleh beberapa kondisi seperti, politik yang tidak stabil dari perang dagang Amerika Serikat dengan China, investasi yang melambat sehingga menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) dan pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan. Sahara (2018) menyatakan, ilmu politik dan ekonomi memiliki hubungan satu sama lain. Kekuatan politik dapat mempengaruhi sistem ekonomi di suatu negara. Ketika suatu negara menggunakan sistem ekonomi liberal, alokasi sumber daya alam ditentukan secara alami oleh pasar. Sedangkan

negara yang menggunakan sistem ekonomi terpimpin, pemimpin yang berkuasa pada saat itu memiliki kehendak untuk menentukan jenis barang dan jasa yang di produksi beserta metode yang digunakan, menentukan waktu dan tempat produksi serta pendistribusiannya, dan penentuan ekspor-impor komoditas strategis juga ditentukan oleh pemegang kekuasaan.

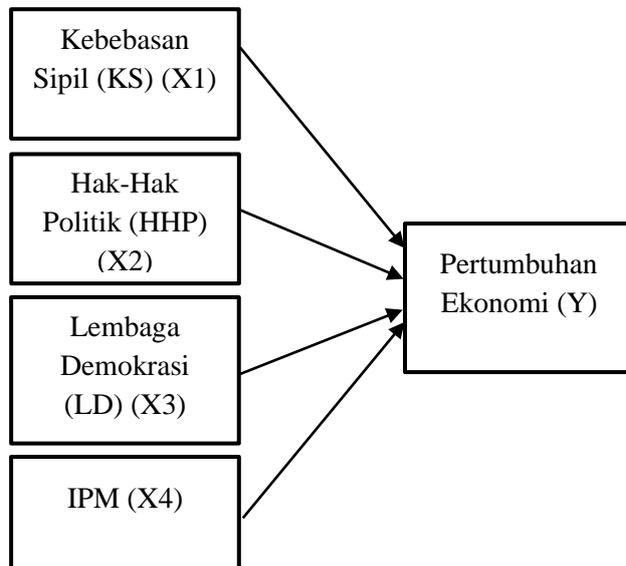
Nurjaman (2020) menyatakan, bahwasannya suatu permasalahan di masyarakat bisa jadi masyarakat lebih suka diselesaikan dengan cara politik daripada ekonomi. Dan pada dasarnya, pasar bekerja tidak hanya dari peredaran informasi antar pelaku ekonomi, namun juga pada dasar prosedur hukum yang dibentuk dari regulator atau pemegang kekuasaan. Mankiw menjelaskan, bahwa kondisi ekonomi suatu negara tidak lepas dari pengaruh faktor politiknya, keamanan dan kestabilan kondisi politik memiliki pengaruh positif terhadap kondisi perekonomian (Wahib, 2018). Sistem pemerintahan Indonesia diatur dalam konstitusi yang berlandaskan pada Pancasila dan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pancasila sila keempat juga menyebutkan “Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Dari dasar tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa pemerintahan negara Indonesia memiliki dasar pemerintahan demokrasi karena sesuai dengan asas demokrasi yaitu, kedaulatan rakyat (Noviati, 2013). Pelaksanaan demokrasi di Indonesia terjamin dalam UUD 1945 yang menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memberikan pendapat, berserikat, ikut andil dalam politik dan pemerintahan (Prasisko, 2019). Menurut Soemantri, demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi *indirect* atau tidak langsung yang artinya pelaksanaan nya tidak dilakukan secara tidak langsung oleh rakyat melainkan di wakili oleh lembaga negara perwakilan rakyat seperti DPR dan MPR (Noviati, 2013).

Menurut North (1990) dalam bukunya “Institutions, Institutional Change and Economic Performance” pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi dari faktor internal dan eksternal, faktor internal dapat berupa inovasi, kebijakan yang di ambil, sedangkan faktor eksternal dapat berupa kondisi politik, perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diterbitkan oleh BPS menjadi acuan dalam melihat perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. IDI mencakup tiga aspek utama yaitu kebebasan sipil, lembaga-lembaga demokrasi, dan hak-hak politik. Penelitian oleh Zahidaluthfa (2018) menemukan bahwa ditemukan korelasi yang positif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi Indonesia dan hasil variabel indeks demokrasi Indonesia. Sedangkan faktor eksternal yang disebutkan oleh North yaitu kondisi sosial. Gambaran mengenai kondisi sosial di Indonesia diperlihatkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasikan oleh BPS. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana yang telah diteliti oleh Rahmawati (2019) dengan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dipengaruhi secara positif oleh IPM. Selaras dengan temuan Susanto dan Rachmawati (2013), ditemukan adanya korelasi positif dan signifikan antara IPM dan pertumbuhan PDB. Berdasarkan uraian tersebut maka, dapat dikatakan bahwa adanya hubungan dari faktor internal dan eksternal kelembagaan terhadap

pertumbuhan ekonomi yang berjalan di Indonesia. Oleh karena itu, kajian terkait pengaruh perkembangan demokrasi dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2015-2020 perlu dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang dipakai dalam kajian ini. Data didapat melalui Badan Pusat Statistik yang berbentuk data sekunder. Data yang dikumpulkan terkait dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), yang mencakup aspek-aspek seperti Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik, dan Lembaga Demokrasi. Selain itu, data juga mencakup Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka pertumbuhan ekonomi dari 34 provinsi selama kurun waktu 2015-2020. Pertumbuhan ekonomi, hak hak politik, lembaga demokrasi, kebebasan sipil dan IPM 34 Provinsi di Indonesia pada periode 2015-2020 adalah populasi dalam kajian ini. Riset ini menggunakan teknik sampling jenuh yang melibatkan pemilihan sampel dari keseluruhan populasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel, yang diolah dengan menggunakan aplikasi Eviews. Analisis regresi data panel melibatkan integrasi data *cross-section* dan data *time-series* untuk melakukan analisis data yang komprehensif (Gujarati, 2013). Dalam analisis regresi data panel untuk mendapatkan hasil perlu dilakukan uji pemilihan model yang terbaik, uji asumsi klasik, uji f simultan dan uji t parsial. Kerangka penelitian yang digunakan yaitu sebagai berikut:



Dengan model data panel serta menggunakan data 34 Provinsi di Indonesia dan rentang waktu tahun 2015-2020, maka berikut adalah model penelitian yang digunakan, yaitu:

$$Y_{it} = a + \beta_1 KS_{it} + \beta_2 HHP_{it} + \beta_3 LD_{it} + \beta_4 IPM_{it} + \epsilon \quad (1)$$

Keterangan :

- Y = pertumbuhan ekonomi
- a = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = koefisien variabel independen
 KS = kebebasan sipil
 HHP = hak-hak politik
 LD = lembaga demokrasi
 IPM = indeks pembangunan manusia
 i = *cross section* (34 Provinsi)
 t = *time series* (tahunan dari 2015-2020)

HASIL PENELITIAN

Uji Pemilihan Model

Uji Chow

Uji chow diterapkan untuk memilih model yang paling baik antara *common effect model* (CEM) dan *fixed effect model* (FEM) .

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section.F	2.106991	(33,166)	0.0012
Cross-section.Chi-square	71.370115	33	0.0001

Sumber: Eviews 9, data diolah

Pada tabel di atas memperlihatkan bahwa Cross-section F memiliki probabilitas senilai 0,0012. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilainya <5% atau 0.05 sehingga *fixed effect model* lebih unggul daripada *common effect model*.

Uji Hausman

Uji hausman diterapkan untuk melakukan pemilihan terhadap model yang paling unggul diantara *random effect* dan *fixed effect*.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	37.261645	4	0.0000

Sumber: Eviews 9, data diolah

Data pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa nilai probabilitas dari uji Hausman adalah 0,0000. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilainya kurang dari 0,05, sehingga *fixed effect model* lebih unggul daripada model *random effect model*. Oleh karena itu, *fixed effect model* (FEM) diterapkan dalam kajian ini karena dari dua uji menunjukkan FEM merupakan model terbaik.

Hasil estimasi regresi *Fixed Effect Model* (FEM)

Temuan uji regresi data panel dengan aplikasi Eviews 9 memperoleh hasil seperti yang dijadikan di bawah ini.

Tabel 3. Hasil Regresi *Fixed Effect Model* (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	119.3534	18.74137	6.368442	0.0000
KS	-0.107094	0.045288	-2.364735	0.0192
HHP	-0.003142	0.046929	-0.066954	0.9467
LD	0.077964	0.034576	2.254831	0.0255
IPM	-1.593076	0.277775	-5.735134	0.0000

Effects.Specification			
Cross-section.fixed (dummy variables)			
R-squared.	0.339422	Mean.dependent var	4.359804
Adjusted R-squared	0.192184	S.D. dependent var	3.674914
S.E. of regression	3.302960	Akaike info criterion	5.393932
Sum squared resid	1810.985	Schwarz criterion	6.012013
Log likelihood	-512.1811	Hannan-Quinn criter.	5.643957
F-statistic	2.305267	Durbin-Watson stat	1.880858
Prob(F-statistic).	0.000180		

Sumber: Eviews 9, data diolah

Dari hasil pengujian, penelitian ini menghasilkan persamaan regresi data panel. Studi ini melakukan pengujian terhadap hubungan antara variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) dengan beberapa variabel independen (kebebasan sipil, hak-hak politik, institusi demokrasi, dan indeks pembangunan manusia) yang hasilnya sebagai berikut:

$$Y_{it} = 119.35 - 0.1070 \cdot KS_{it} - 0.0031 \cdot HHP_{it} + 0.0779 \cdot LD_{it} - 1.5930 \cdot IPM_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

Nilai *R-squared* yang didapat adalah 0.339422. Hal ini menunjukkan variasi dalam variabel independen menyumbang 33,9% dari penjelasan untuk variabel dependen dan 66,1% sebagai sisanya diuraikan oleh variabel luar yang tidak dipertimbangkan dalam riset ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dari model FEM adalah uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Uji multikolinearitas

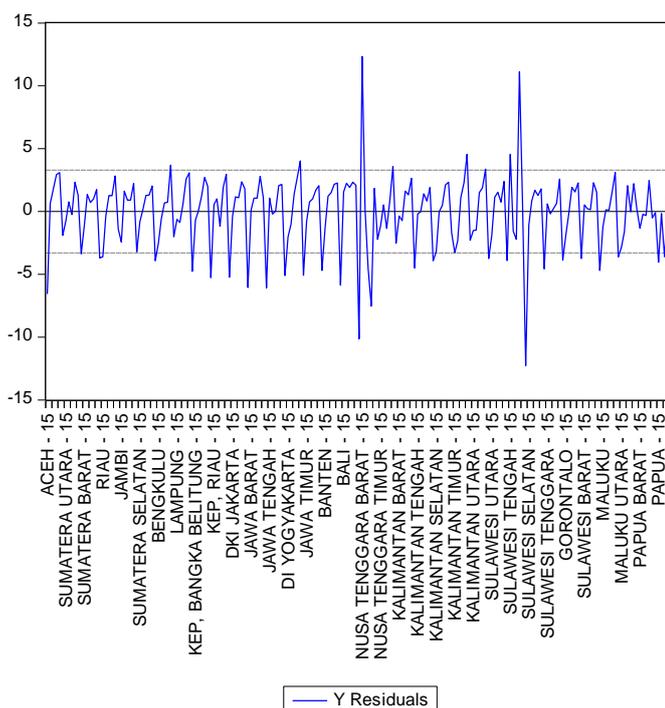
Tabel 4. Hasil Multikolinearitas

KS	HHP	LD	IPM
----	-----	----	-----

KS	1.000000	0.004508	-0.101312	0.080952
HHP	0.004508	1.000000	0.249592	0.471096
LD	-0.101312	0.249592	1.000000	0.390821
IPM	0.080952	0.471096	0.390821	1.000000

Berdasarkan tabel 4 memperlihatkan hubungan antar variabel kurang dari 0.85 sehingga lolos uji multikolinieritas (Ghozali, 2018).

Uji heteroskedastisitas



Gambar 2. Grafik Hasil Uji Heterokedastisitas

Dari hasil uji diperoleh nilai residual tidak melebihi batas (500 dan -500), menunjukkan adanya persamaan varian residual. Sehingga dapat di simpulkan lolos uji heterokedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Uji f simultan

Hasil estimasi memperoleh hasil nilai probabilitas *F-statistic* sebesar 0.000180. Hal tersebut memperlihatkan bahwa angka tersebut kurang dari ($>$) dari taraf signifikansi $= 0.05$. Dengan demikian, peneliti menarik suatu kesimpulan bahwa semua variabel (Kebebasan Sipil, Hak Politik, Lembaga Demokrasi, dan Indeks Pembangunan Manusia) memainkan peran penting dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi.

Uji t parsial

Pada variabel Kebebasan Sipil (KS), nilai probabilitas yang diperoleh yaitu 0.0192. Nilai tersebut kurang dari ($<$) dari taraf signifikansi 0.05 dan nilai statistik - 2.364735, sehingga dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi dapat di pengaruhi oleh kebebasan sipil secara negatif dan signifikan. Variabel Hak-Hak Politik (HHP)

mempunyai nilai probabilitas 0.9467 yang ($>$) dari nilai signifikansi 0.05, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi hak-hak politik. Sedangkan nilai probabilitas variabel LD (Lembaga Demokrasi) adalah 0.0255 yang artinya ($<$) taraf signifikansi 0.05 dan nilai statistik yaitu 2.254831, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga demokrasi memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai probabilitas variabel IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yaitu sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih rendah ($<$) dari taraf signifikansi 0.05 dan nilai statistik sebesar -5.735134, maka suatu kesimpulan dapat ditarik bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembahasan

Pengaruh Kebebasan Sipil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Berdasarkan temuan analisis regresi data panel menunjukkan bahwa nilai koefisien kebebasan sipil yaitu -0.11. Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015-2020. Hal ini di buktikan dengan nilai probabilitas kebebasan sipil terhadap pertumbuhan ekonomi 0.01 kurang dari ($<$) taraf signifikansi 0.05. Dari temuan ini memang berlawanan dengan teori pertumbuhan dalam Ekonomi Kelembagaan yang memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh kebebasan sipil. Namun temuan ini juga selaras dengan riset yang diteliti oleh Yudanto (2021) yang mengemukakan bahwa selama periode 2015-2019 di Indonesia korelasi antara kebebasan sipil dengan pertumbuhan ekonomi sangatlah lemah dan menunjukkan koefisien korelasi bernilai negatif. Secara teoritis kebebasan sipil. Temuan yang serupa juga diperoleh oleh Purba & Hariyadi (2023) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa kebebasan sipil di Indonesia pada tahun 2015-2021 tidak berpengaruh nyata atau signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya politisasi dimensi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) di tahun politik (pemilu DKI Jakarta tahun 2016-2017, Pemilu Indonesia 2019) dan Pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap menurunnya tingkat sosial dalam hal ini kebebasan berpendapat di ruang publik. Meskipun secara teori terkait kebebasan berpendapat, berekspresi untuk menyampaikan kritikan terhadap pemerintah dapat membantu sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan sehingga dapat menciptakan ekosistem pemerintahan yang baik, namun pada kenyataannya hal tersebut perlu ditinjau kembali ketersesuaian antara kebijakan yang diambil dengan aspirasi masyarakat. Menurut Juniarto (2022) dalam laporannya yang berjudul "Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2021" yang diterbitkan oleh *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net)* memberikan laporan bahwa semakin masifnya jumlah masyarakat sipil yang dituntut dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu hampir 900 orang dituntut pada tahun 2013-2021 (9 tahun) dengan paling banyak merupakan aktivis HAM. Sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat, namun dari segi kebebasan sipil

mengalami penurunan. Dari kasus ini dapat menimbulkan kekhawatiran terkait kebebasan berpendapat yang seharusnya menjadi salah satu faktor terbentuknya negara yang demokratis dan mampu menerima masukan dan kritikan yang sesuai asas demokrasi.

Pengaruh Hak-Hak Politik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Studi ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh hak-hak politik. Dari hasil analisis diperoleh nilai koefisien dan probabilitasnya tidak memenuhi kriteria dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan teori ekonomi kelembagaan, namun temuan yang serupa juga dikemukakan oleh Santika (2017) bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh hak-hak politik. Begitu juga yang dilakukan Yudanto & Nugroho (2021) dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa pada tahun 2015-2019 indeks pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak berhubungan dengan hak-hak politik.

Pemenuhan hak-hak politik merupakan suatu hal yang wajib ada dalam sistem demokrasi. Namun disamping terpenuhinya hak politik, kemauan politik atau *political will* dari penyelenggara pemerintah juga perlu di maksimalkan. Sehingga tidak hanya terpenuhi haknya saja, namun kewajibannya juga harus dilaksanakan untuk mencapai sistem demokrasi yang sesuai dengan konstitusi. Selain itu kategori aspek hak-hak politik selalu berfluktuatif yang disebabkan oleh penyelenggaraan pemilu daerah yang berbeda-beda tiap tahunnya (Purba, 2023). Dari ketiga aspek IDI, hak-hak politik memiliki nilai rata-rata paling rendah dalam periode 2015-2020, dengan kategori nilai cukup yaitu sebesar 66.9. Sedangkan provinsi dengan nilai hak-hak politik paling rendah adalah Papua Barat dengan nilai 38, kemudian ada provinsi Papua dengan nilai hak-hak politiknya sebesar 41. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hak-hak politik seperti hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, serta hak untuk ikut serta masih belum dilakukan secara maksimal sehingga hanya segelintir orang yang memperoleh hak tersebut. Sedangkan nilai pertumbuhan ekonomi di pulau Papua dalam kurun waktu 2015-2020 di atas rata-rata nasional.

Pengaruh Lembaga Demokrasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Temuan penelitian mengarah pada suatu kesimpulan bahwa lembaga demokrasi mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang dibuktikan dengan koefisien nilai dari lembaga demokrasi sebesar 0.8% terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh signifikan. Temuan ini selaras dengan temuan yang didapatkan oleh Purba & Hariyadi (2023) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh lembaga demokrasi. Artinya bahwa semakin meningkat aspek lembaga demokrasi akan

membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian dari Sabardin (2023) dan Acemoglu (2019) juga memperoleh hasil bahwa lembaga demokrasi mempunyai dampak secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Lembaga demokrasi yang dijelaskan oleh BPS memiliki banyak indikator perhitungan, salah satunya yaitu pemilu (pemilihan umum). Menurut Kementerian Keuangan (2023) melalui pemilu akan memberikan dampak efek pengganda ekonomi berupa naiknya konsumsi pemerintah yang diberikan kepada jasa-jasa penyedia/pendukung dalam proses pemilu seperti jasa percetakan, konsumsi, kendaraan dan lain sebagainya. Sehingga terjadi naiknya perputaran ekonomi di pasar. Di sisi lain menurut Adib (2019), lembaga demokrasi mempunyai peran dalam melakukan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah dan memberikan batasan terhadap perilaku pemerintah yang menyimpang/buruk. Secara tidak langsung melalui lembaga demokrasi seperti birokrasi pemerintah daerah dan lembaga peradilan yang mandiri yang memberikan kepastian terhadap masyarakat maupun investor terhadap situasi hukum dan birokrasi di Indonesia. Sehingga penguatan kualitas lembaga demokrasi dapat membantu meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pengaruh IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Temuan penelitian menyatakan bahwa nilai statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu -5.735134 yang artinya IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun hal tersebut berkebalikan dengan teori pertumbuhan ekonomi yang menyatakan bahwa semakin baik kualitas SDM maka akan membantu pertumbuhan ekonomi. Namun, Muqorrobin dan Soejoto (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa IPM secara signifikan dan negatif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Astuti (2022) dalam penelitiannya juga menghasilkan temuan yang serupa bahwa Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh negatif signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia diperoleh dengan penghitungan yang dilakukan oleh BPS dengan 3 (dimensi) Berdasarkan data dari BPS tahun 2022 tentang jumlah pekerja menurut jenjang pendidikan, tidak/belum pernah sekolah/tamat SD merupakan yang paling banyak menjadi pekerja dengan jumlah kurang lebih 17 juta pekerja dengan didominasi sebagai buruh/karyawan dan di sektor pertanian yang lebih banyak dari lulusan jenjang pendidikan yang lain. Dan jenjang pendidikan tinggi atau perguruan tinggi dan Diploma I/II/III hanya sebesar 12,60 persen dari seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia. Sehingga dalam dimensi pendidikan meskipun mengalami kenaikan di tiap tahunnya tapi masih belum signifikan dalam memberikan imbal balik terhadap perekonomian. Karena faktor lulusan juga berpengaruh terhadap posisi/jabatan dengan gaji yang diterima. Ketimpangan antara lulusan pendidikan dengan ketersediaan lapangan kerja diperparah oleh keberadaan pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sehingga banyak lulusan saat itu tidak mendapat pekerjaan yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengangguran sebesar hampir 2% atau sejumlah 2.67 juta orang. Menurut Suharno, et al. (2020) kondisi ini dipengaruhi oleh pemangku kepentingan yang belum memahami konsep ekonomi, sehingga kurikulum pendidikan disusun hanya

dengan tujuan akademis yang tidak dapat di implementasikan dalam dunia industri. Kondisi pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh IPM tersebut karena mengalami kondisi *Looped Human Development* atau pembangunan manusia yang tinggi tidak berjalan seiringan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula (Yusuf et al., 2022).

Tingkat IPM yang tinggi dari dimensi secara pendidikan dan sosial tidak selalu akan berdampak terhadap bagus dimensi ekonomi, karena faktor ekonomi dipengaruhi lebih luas lagi terutama pertumbuhan ekonomi yang secara perhitungannya diambil dari Produk Domestik Bruto yang dihitung dari nilai investasi, konsumsi, ekspor dan impor serta pengeluaran pemerintah. Sehingga secara statistik jarang untuk ditemukan keterkaitan yang lebih kuat.

KESIMPULAN

Penelitian memperoleh kesimpulan bahwa kebebasan sipil berdampak negatif signifikan, hak-hak politik tidak berpengaruh, lembaga demokrasi berpengaruh positif signifikan dan IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015-2020. Selama periode 2015 hingga 2020, perkembangan demokrasi dan IPM di Indonesia menunjukkan korelasi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai *R-square* sebesar 0,33. Artinya, kebebasan sipil, hak-hak politik, lembaga demokrasi dan IPM secara simultan memiliki kemampuan sebesar 33% dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan 67% sebagai sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya diluar penelitian.

Teori tentang demokrasi dalam ekonomi kelembagaan merupakan hal yang baru sehingga perlu penelitian pendukung yang lebih luas lagi. Penelitian ini memberikan dukungan kuat terhadap teori dampak ademokrasi terhadap ekonomi dalam ekonomi kelembagaan. Dengan menggunakan sistem ekonomi kerakyatan dan sistem demokrasi politik seharusnya mampu memberikan pemerataan pembangunan terhadap masyarakat sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi. Kebijakan penyediaan lapangan kerja yang merata, penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan kondisi ekonomi, peningkatan keterampilan masyarakat dalam upaya mendorong produktivitas sumber daya manusia, serta pemenuhan hak-hak politik sebagai wujud terciptanya kondisi politik yang demokratis dan dapat di maksimalkan dengan baik. Saran untuk penelitian yang bertalian dengan riset ini adalah pengembangan variabel dan metode analisis yang lebih bervariasi sehingga mampu memperoleh hasil yang lebih baik.

REFERENSI

- Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P., & Robinson, J. A. (2019). Democracy Does Cause Growth Suresh Naidu Pascual Restrepo. *Journal of Political Economy*; 127(1): 47–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/700936>.
- Adib, dkk. (2019). Analisis Pengaruh Demokrasi, Indeks Gini dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ecosains*; 8(1): 67-76. <https://doi.org/10.24036/ecosains.11519657.00>.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Politik Indonesia 2021*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia 2022*.
- Bank Indonesia. (2021). *Perkembangan Ekonomi Global 2021*.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Penerjemah: Raden Carlus Mangunsong. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS Edisi Sembilan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Komisi Pemilihan Umum. *Sejarah Pemilu Indonesia*. Diperoleh pada 22 Desember 2022 dari https://www.kpu.go.id/koleksigambar/1_OK_SEJARAH_PEMILU_1-5.pdf.
- Muqorrobin, M., & Soejoto, A. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*; 5(3). <https://doi.org/10.26740/jupe.v5n3.p%25p>.
- Nurjaman, A. (2020). *Ekonomi Politik Teori dan Praktek*. Malang: UMM Press.
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*; 10(2). <https://doi.org/10.31078/jk1027>.
- Purba, S. F., & Hariyadi, H. (2023). Relasi Bauran Aspek Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*; 14(2): 165-188. <https://doi.org/10.14710/politika.14.2.2023.165-188>.
- Prasisko, Y. G. (2019). Demokrasi Indonesia Dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal Waskita*; 3(1). <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2019.003.01.1>.
- Rahmawati, Y. O. (2019). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Dan Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 1995-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Universitas Brawijaya. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5796>.
- Sabardin, & Wibowo, M. G. (2023). Pengaruh Aspek-Aspek Demokrasi Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2016-2020. *J-MES Jurnal Magister Ekonomi Ekonomi Syariah*; 2(2): 119-131. <https://doi.org/10.14421/jmes.2023.022-08>.
- Sahara. (2018). *Politik dan Ekonomi*. Institut Pertanian Bogor. Diperoleh pada 20 November, 2022 dari <https://ekonomi.ipb.ac.id/politik-dan-ekonomi/>.
- Suharno, Prambudi, N. A., & Harjanto, B. (2020). Vocational Education in Indonesia: History, Development, Opportunities, and Challenges. *Children and Youth Service Review*. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2020.105092>
- Susanto, A. B., Rachmawati, L. (2013) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Pendidikan (JUPE)*; 1(3). <https://doi.org/10.26740/jupe.v1n3.p%25p>.

- Yudanto, R., & SBM., N. (2021). Analisis Hubungan Indeks Kebebasan Sipil, Indeks Hak-Hak Politik, Indeks Lembaga Demokrasi, dan Indeks Gini dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Kalcakra*; 2(2): 91-96. <http://dx.doi.org/10.31002/kalacakra.v2i2.4378>.
- Yustika, A. E. (2013). *Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga.